

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Jaya kembali kepada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah melewati proses yang sangat panjang dalam merebut kembali Irian Jaya kembali ke Indonesia pada tahun 1949. Indonesia melakukan perundingan yang pertama dengan negara Belanda untuk membahas dan mengembalikan Papua kembali ke tanah air. Belanda dan Indonesia harus membicarakan isu mengenai Papua, tetapi Belanda tidak menepati perjanjian tersebut. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno melakukan sebuah pergerakan aksi atas tindakan Belanda yang tidak memenuhi kesepakatan yang sudah ada, dengan melakukan Agresi Militer I pada tahun 1954 sampai 1960. Presiden Soekarno memerintahkan pembentukan TRIKORA (Tri Komando Rakyat) yaitu sebuah pergerakan untuk menghadapi politik *dekolonisasi*, kehadiran Trikora ini membentuk terciptanya serangan militer terbatas dari Indonesia terhadap Belanda untuk menekan Belanda mengenai *New York Agreement*.

Pada tahun 1962 Indonesia dan Belanda melakukan perundingan kembali dengan melakukan *New York Agreement* pada tahun 1962. Perundingan di antara kedua negara yang memiliki persetujuan dihadiri oleh negara Amerika Serikat diwakili oleh Elsworth Bunker, membuat sebuah solusi kepada PBB terhadap penyelesaian persoalan Papua. Tekanan yang dibuat oleh Amerika Serikat membuat

Belanda menandatangani seluruh rumusan dalam usulan yang dibuat oleh Elsworth Bunker, tetapi Indonesia harus dapat memenuhi dan memperhatikan hak-hak masyarakat Papua. Itulah yang menjadi sebuah awal Papua dapat kembali ke Indonesia.

Pada tahun 1969, Papua melakukan penyelenggaraan *Act of Free Choice* (PEPERA). Kegiatan dilaksanakan pertama kali di di Merauke pada tanggal 14 juli. Lalu, selesai pada tanggal 2 Agustus 1969 yang dilaksanakan di 8 kota yaitu : Kab Merauke, Kab Jayawijaya, Kab.Paniai, Kab Fak-Fak, Kab Sorong, Kab Manokwari, Kab Teluk Cendrawasih dan Kota Jayapura. Serta pelaksanaan PEPERA dihadiri oleh utusan PBB yaitu Dr. Fernando Ortiz Sans (Duta Besar dari Bolivia untuk PBB). Dalam pengambilan keputusan ini diwakili oleh 1025 dari 815.906 orang.

Setelah penyelenggaraan resmi PEPERA yang dilakukan pada tahun 1969, muncul konflik mengenai PEPERA yang dinilai terjadi kecurangan dikarenakan individu yang memilih serta berpartisipasi merupakan pilihan dari pemerintahan Indonesia tetapi masyarakat asli Papua tidak dilibatkan secara langsung. Intimidasi dan tidak adanya toleransi perbedaan pendapat merupakan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat pemilihan PEPERA “Saltfor (2003).”

Setelah Pemerintah Indonesia resmi memegang hak penuh wilayah Papua dan Papua Barat, mulai terjadi konflik-konflik yang terjadi antara Pemerintah dengan masyarakat sekitar. Pada saat itu pemerintah melakukan pendekatan militer

yang mempunyai tujuan menjaga kedaulatan Indonesia dan mengantisipasi kelompok-kelompok *separatism*. Pendekatan militer yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan operasi militer ke beberapa daerah. Pada tahun 1970-1984 masyarakat Papua membentuk sebuah organisasi yang bernama Organisasi Papua Merdeka. Organisasi ini merupakan bentuk dari protes terhadap *Act of Free Choice*. Kelompok ini memberikan sebuah bentuk perlawanan mengenai intimidasi serta pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia. Konflik-konflik mulai bermunculan dengan ditandai perseteruan OPM dan aparat keamanan sehingga menimbulkan tragedi Kasus Biak (1970), Kasus Wamena (1977) dan Kasus Jayapura (1980). Konflik yang terjadi antara masyarakat Papua dengan Aparat Militer mengharuskan seribu dua ratus masyarakat Papua bertransmigrasi ke Papua Nugini. Peristiwa yang dialami oleh masyarakat Papua disebut "*Memoria Passionis*" yaitu sebuah ingatan kolektif tentang penderitaan yang mereka alami. Masyarakat Papua mengalami rasisme institusional yaitu merupakan para aparat keamanan yang mempunyai sebuah perspektif bawah semua masyarakat Papua adalah separatis.<sup>1</sup>

Pada tahun 1998 setelah turunnya pemerintah otoriter Presiden Soeharto, masyarakat Papua mendapatkan semangat dan kepercayaan untuk dapat memisahkan diri dari Indonesia. Pendekatan militer yang dilakukan oleh pemerintah pusat berdampak terjadinya intimidasi dan pelanggaran HAM yang membuat masyarakat Papua mempunyai tekad harus terbebas dan dapat berdiri

---

<sup>1</sup> I Ngurah Suryawan, "Dari Memoria Passionis Ke Foreri: Sejarah Politik Papua 1999-2000," *Paramita: Historical Studies Journal* 22, no. 2 (2012).

sendiri. Pada tahun 1999, masyarakat Papua melakukan sebuah forum yang bernama FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya) yaitu membentuk pimpinan tim 100 untuk bertemu Presiden B.J Habibie. Tujuan dari pertemuan yang dilakukan untuk memberikan sebuah pernyataan dan tujuan untuk Papua dapat memisahkan diri dari Indonesia.

Melalui perundingan dan konsolidasi dengan B.J Habibie, dimana Presiden B.J Habibie meminta untuk mempertimbangkan kembali keinginan memisahkan diri. Setelah melakukan sebuah perundingan dengan Presiden B.J Habibie, tim 100 tidak menemukan sebuah kepastian yang jelas. Setelah kembali ke Papua, tim 100 terbagi menjadi dua bagian yaitu sisi pemerintah paralel dan sisi masyarakat sipil. Lalu terbentuk Dewan Presidium Papua yang dilakukan oleh para aktivis politik. PDP terbentuk di saat masa pemerintahan transisi B.J Habibie ke masa pemerintahan Abdurahman Wahid dan melanjutkan kursi pemerintahan Indonesia. PDP memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat Papua untuk dapat mengaspresiasi pendapat serta terlibat untuk memajukan hak dan kebebasan tanpa penindasan di Papua. Setelah kemajuan politik di bawah pemerintah Abdurahman Wahid masyarakat Papua dapat mengibarkan bendera bintang kejora.

Pada tahun 2001, otonomi khusus dirancang untuk dapat mendukung pemerintah daerah mempunyai peranan yang lebih besar. Masyarakat Papua pada saat itu mendapat sebuah haknya sebagai warga negara. Kebebasan berpendapat yang diberikan kepada masyarakat Papua pada saat itu membuat masyarakat dapat mengekspresikan sebuah aspirasi dengan melakukan pengibaran bendera bintang kejora yang dianggap sebagai simbol pergerakan perlawanan. Masyarakat Papua

memanfaatkan ruang politik yang terbuka untuk dapat memasukkan aspirasi sebanyak mungkin untuk melakukan perubahan dan mewujudkannya. Tetapi seiring berjalannya otonomi khusus serta ruang gerak politik yang bebas, terdapat pertentangan dengan pemerintah pusat yang telah berganti kekuasaan dan menilai adanya pelanggaran yang dapat mengganggu kedaulatan, serta terdapat kasus pelanggaran di dalam penyelenggaraan otonomi khusus tersebut. Pemerintah Indonesia melihat pergerakan aktivis politik dengan memanfaatkan situasi untuk dapat melakukan sebuah tujuan yang dapat mengganggu aktivitas kedaulatan Indonesia. Presiden Megawati yang menjabat sebagai Presiden Indonesia pada saat itu melakukan tindakan penangkapan kepada lima aktivis dan memenjarakan mereka, tetapi tidak lama kemudian dibebaskan. Pemerintah melakukan sebuah upaya untuk dapat melemahkan pergerakan ini karena dinilai dapat mengganggu stabilitas kedaulatan negara. Keberhasilan otonomi khusus yang telah berjalan dirusak karena kegagalan pemerintah provinsi dan pusat dalam melaksanakan mekanisme hukum yang seharusnya dapat dijalankan, serta korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin lokal di Papua pada tingkat kabupaten dan provinsi menjadikan otonomi khusus dinilai tidak berhasil.<sup>2</sup>

Terpecahnya masyarakat Papua dan kegagalan otonomi khusus merupakan bagian dinamika konflik Papua yang menjadikan permasalahan Papua semakin sulit diselesaikan. Kegagalan dan timbulnya konflik-konflik baru dimanfaatkan oleh para kelompok separatis untuk dapat membangun sebuah kelompok lewat jalur

---

<sup>2</sup> Jason MacLeod, "The Struggle for Self-Determination in West Papua (1969-Present)," no. March (2011): 14.

bawah tanah dengan mencari jalan lain untuk tetap membulatkan tekad memisahkan Papua dengan Indonesia. Organisasi Papua Merdeka yang mengalami redupnya eksistensi pada saat pembentukan tim 100 mulai merencanakan dan membuat Kongres Rakyat Papua II. Kongres ini dibentuk untuk dapat mengembalikan Papua ke dalam hakikatnya dengan membentuk pemerintahan sendiri, serta membentuk sebuah tim untuk membangun komunikasi dan hubungan politik dengan aktor-aktor Internasional. Tim yang diutus melakukan sebuah komunikasi dengan Dewan Keamanan PBB untuk meminta secara langsung dan terlibat untuk menjaga keamanan di Papua dan meminta berdialog secara langsung dengan Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan PBB. Komunikasi dan hubungan yang dilakukan oleh kelompok ini dengan membangun hubungan bilateral di forum Regional maupun Internasional. Komunikasi yang dibangun dengan cara melakukan pendekatan persuasif kepada aktor yang berperan penting di berbagai Negara. Pendekatan yang dilakukan dengan menyuarakan tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di Papua. Kelompok ini menyuarakan tentang bagaimana masyarakat Papua mengalami intimidasi, diskriminasi, serta terjadi pelanggaran HAM berat oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua. Dan kelompok separatis ini melakukan hubungan dengan negara-negara Afrika yang mempunyai ras sama dengan menceritakan bagaimana kondisi dan nasib di Papua, serta meminta dukungan kepada negara-negara di kawasan Benua Afrika, serta berjanji akan memberikan kekayaan alam yang dimiliki oleh Papua. Dimensi Kasus Papua yang sangat luas dikarenakan permasalahan yang saling terhubung satu dengan lainnya yaitu permasalahan seperti Ekonomi, Pelanggaran HAM dan kerusakan

lingkungan membuat permasalahan yang berada di Papua semakin kompleks dan menjadi sebuah pekerjaan rumah untuk pemerintah Indonesia.<sup>3</sup>

Permasalahan yang panjang mengenai kasus Papua serta kelompok separatis yang memanfaatkan isu-isu mengenai permasalahan yang ada, menjadikan sebuah celah untuk kelompok-kelompok separatis meng-internasionalisasikan isu Papua ke dunia Internasional.

Internasionalisasi isu merupakan sebuah rancangan strategis terukur dan terencana untuk mempengaruhi aktor-aktor internasional untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan kelompok ter-marjinal. Menurut teori sebuah proses internasionalisasi harus memenuhi tiga kriteria aktor yaitu, Aktor harus memiliki kompetensi dan integritas, harus mempunyai advokasi, dan aktor mempunyai target seperti negara *great power*.<sup>4</sup>

Kelompok separatis yang mendukung pergerakan Papua melakukan internasionalisasi isu dengan membangun sebuah hubungan regional dengan negara-negara anggota MSG. Kelompok ini meminta dukungan tentang keinginan untuk dapat memerdekakan Papua dan terbebas dari intimidasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia. Hubungan yang dibangun melalui kedekatan ras dan wilayah, membuat beberapa Negara Pasifik mendukung pergerakan kelompok ini dalam menjalankan tujuan memerdekakan Papua.

---

<sup>3</sup> Adriana Elisabeth, "Dimensi Internasional Kasus Papua," *Jurnal Penelitian Politik* Vol.3 No.1 (2006): 43–65, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/issue/view/60>.

<sup>4</sup> Gunawan, Gun Gun. "Isu Papua Yang Jadi Sorotan Dunia Internasional, Gimana Duduk Perkaranya?" OPINI.ID, OPINI.ID, 16 July 2020, [opini.id/sosial/read-14796/isu-Papua-yang-jadi-sorotan-dunia-internasional-gimana-duduk-perkaranya](http://opini.id/sosial/read-14796/isu-Papua-yang-jadi-sorotan-dunia-internasional-gimana-duduk-perkaranya).

Beberapa kelompok kemerdekaan Papua Barat sepakat dipersatukan menjadi sebuah satu naungan tunggal dan membuat organisasi yang kuat. Dan terbentuklah sebuah organisasi tunggal yang bernama *United Liberation Movement for West Papua*, organisasi ini disahkan di Vanuatu. ULMWP mendapat dukungan sejak didirikannya pada tahun 2014 dari negara-negara Pasifik seperti Vanuatu, Tuvalu dan Cook Island.<sup>5</sup> Vanuatu merupakan salah satu negara yang sangat gencar sekali mendukung kelompok ini karena Vanuatu, mempunyai UU Wantok Blong Yumi Bill, yaitu undang-undang yang berisi akan terus mendukung sebuah koloni yang masih terjajah dan tertindas, tetapi undang-undang ini tidak berlaku karena Papua bukan merupakan sebuah koloni dan masih menjadi bagian dari NKRI.

*United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) melakukan sebuah internasionalisasi isu dengan menghadiri forum-forum dan melakukan aktivitas dengan melakukan kampanye-kampanye untuk mendapat atensi dari masyarakat internasional dan mendukung pergerakan yang dilakukan oleh kelompok ini. ULMWP melakukan beberapa aktivitas internasional contohnya seperti Ketua Kelompok ULMWP membuat sebuah petisi yang meminta PBB untuk mengkaji referendum dan memberi kesempatan Papua untuk dapat menentukan nasib sendiri. Petisi ini telah ditanda tangani 1.8 juta orang dan diserahkan kepada Komisi HAM PBB.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Papua Nugini, "Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri Melanesia Spearhead Group (MSG) Dalam Isu Papua Barat: Studi Kasus Fiji Dan Papua Nugini," *Indonesian Perspective* 4, no. 1 (2019): 59–81.

<sup>6</sup> Abc, A. (2019, January 30). Bagaimana Masalah Papua Barat di Dunia Internasional Saat Ini? Retrieved September 03, 2020, from <https://www.tempo.co/abc/3582/bagaimana-masalah-Papua-barat-di-dunia-internasional-saat-ini>

Sejak Pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia terus mengupayakan penyelesaian konflik yang berada di Papua. Upaya-upaya yang terus di lakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks ini dengan melakukan pembangunan dan mengubah pendekatan pemerintah Indonesia dalam menangani Papua serta melakukan kerja sama regional dan membuat kebijakan-kebijakan untuk dapat menyelesaikan konflik ini.

Salah satu permasalahan yang berada di Papua yaitu mengenai minimnya kemajuan infrastruktur, ekonomi dan kesejahteraan yang berada di Papua yang membuat masyarakat Papua merasa terasingi di negeri sendiri. Sejak pemerintahan Jokowi, Pemerintah mulai melakukan pembangunan dan pendekatan yang komprehensif untuk Papua.<sup>7</sup>

Dalam menyelesaikan konflik Papua, Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan mengenai transparansi tentang permasalahan yang berada di Papua. Pemerintah Indonesia terus berupaya menyelesaikan permasalahan konflik yang berada di Papua dengan membuat sebuah kebijakan mengenai pencabutan larangan media asing untuk dapat meliput Papua. Salah satu permasalahan yang berada di Papua yaitu minimnya berita dan informasi mengenai perkembangan dan transparansi mengenai isu ini. Media dapat mempunyai peran penting dalam suatu konflik yang di mana media dapat mempengaruhi publik dan membuat sebuah perspektif mengenai suatu konflik dan aktor-aktor yang berperan. Dalam konflik Papua media asing telah lama dilarang untuk meliput bahkan memberitakan

---

<sup>7</sup> Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, "KSP 2 Tahun Jokowi JK.Pdf," 2016, <https://kerjanya.id/portfolio/tiga-fokus-utama-ii-pembangunan-manusia/>.

mengenai apa saja yang terjadi di Papua. Pembatasan ini dinilai dapat memberikan stigma buruk tentang pemerintah Indonesia yang tidak transparansi dalam menyelesaikan konflik Papua. Tetapi pada tahun 2015, Pemerintahan Indonesia membuat sebuah kebijakan baru mengenai media asing dapat meliput dan masuk ke dalam kawasan Papua. Kebijakan ini merupakan sebuah perubahan bagaimana Indonesia serius dalam menyelesaikan konflik yang berada di Papua serta mengubah perspektif dunia internasional tentang bagaimana Indonesia serius dalam menyelesaikan konflik yang berada di Papua. Dan perubahan kebijakan ini dapat melawan isu-isu hoaks yang selama ini diberitakan oleh para kelompok separatis tentang kondisi dan konflik yang berada di Papua.

Upaya-upaya Indonesia untuk dapat menyelesaikan konflik ini, tidak hanya memperbaiki kondisi internal domestik yang berada di Indonesia, tetapi pemerintahan Indonesia pun membangun sebuah hubungan dengan aktor-aktor yang terkait mengenai permasalahan Papua. Salah satunya Indonesia melakukan hubungan dengan anggota negara regional yang bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG). MSG merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara yang mempunyai kesamaan budaya Malenesia. Anggota dari MSG ini yaitu Fiji, Solomond Island, Papua Nugini, dan Vanuatu. MSG didirikan pada tahun 1988 dan Indonesia bergabung menjadi *Associate Member* pada tahun 2015<sup>8</sup>. MSG mempunyai peran mengenai permasalahan yang terjadi di Papua, dan Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan menjadi *Associate Member* dengan

---

nesia. Visi dari Melanesian Spearhead Group adalah dekolonisasi dan kebebasan seluruh negara Melanesia dengan upaya mengembangkan identitas dan keterkaekonomi masyarakat be

membangun hubungan melalui negara anggota dan memberikan kesempatan untuk datang ke Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Permasalahan konflik-konflik dan jalan buntu di dalam permasalahan yang berada di Papua dimanfaatkan oleh kelompok separatisme untuk dapat mencari dukungan internasional dengan membangun komunikasi dan hubungan dengan kelompok negara di kawasan regional dan internasional. Kelompok separatisme memanfaatkan konflik yang berada di Papua untuk dapat meng-internasionalisasikan isu Papua ke dunia internasional.

### **Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dan fokus penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana peran pemerintah membuat strategi pencegah internasionalisasi isu Papua untuk dapat mempertahankan kedaulatan. Untuk itu penulis mengajukan pertanyaan penelitian: Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menangani Internasionalisasi isu Papua?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang saya tuliskan sebelumnya, membuat saya untuk melakukan penelitian dengan maksud untuk dapat memberikan penjelasan mengenai strategi pemerintah dalam menangani Internasionalisasi isu Papua.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Menjadikan karya tulis ini menjadi pedoman bagi penelitian yang akan meneliti kasus yang sama,

2. Memberikan sebuah perspektif baru mengenai peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan Papua melalui strategi pendekatan inklusi dalam menangani Internasionalisasi isu Papua.

### **1.5 Sistematika penulisan**

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan pada tugas akhir ini. Penjelasan di sub bab ini akan menerangkan masing-masing bab mengenai bagaimana penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

#### **BAB I - PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini penulis menjabarkan tentang latar belakang dari judul yang ditulis mengenai strategi pemerintah dalam menangani Internasionalisasi isu Papua, yang di mana penulis menjelaskan bagaimana pemerintah Indonesia melakukan strategi memanfaatkan peran media asing, dan pada bab ini penulis merumuskan permasalahan yang menjadi penelitian di tulisan ini.

#### **BAB II - KERANGKA TEORI**

Pada bab kedua ini penulis memberikan fokus untuk dapat melihat Tinjauan Pustaka yang akan menjadi fokus utama penulis, dalam kerangka teori ini, penulis akan memberikan penjelasan konsep yang akan diterapkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

### BAB III - METODE PENELITIAN

Bab ketiga akan menjelaskan tentang cara penulis menentukan pendekatan ilmiah yang akan digunakan dan pada bab ini penulis menjabarkan tentang bagaimana penulis mendapatkan data-data untuk melakukan penelitian lebih jauh.

### BAB IV - PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memberikan penjelasan serta membahas tentang makna dari tugas akhir ini, serta pada bab ini akan menjawab rumusan masalah pada bab satu secara detail.

### BAB V - KESIMPULAN

Pada bab kelima ini penulis akan memberikan kesimpulan mengenai isi dari pembahasan yang sudah dijelaskan oleh penulis pada Bab IV, pada bab ini penulis memberikan ini dari isi pembahasan yang sudah dijelaskan.

Dengan ini penulis memberikan gambaran mengenai sistematika penulis yang ada pada penelitian tersebut. Melalui sistematika penulisan akan memberikan kemudahan untuk pembaca yang ingin mencari tau lebih jauh mengenai tulisan tugas akhir ini.